

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perserikatan*, Citra aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Miru, 2016, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta.
- Djaja S, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Firman F. Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Komarian, 2005, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang.
- Merlly Amalia. 2017, *Pelayanan Keluarga Berencana (KB)*. LovRinz Publishing. Cirebon
- Mariam Darus, 2005, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT.Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Ridwan Tjandra, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta. .
- Salim.HS, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Subekti, 2006, *Aneka Perjanjian*, Press Citra Aditya Bakti, Bandung
- Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sri Soesilowati Mahdi, dkk, 2005, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, CV. Gitama Jaya, Jakarta.

W Riawan Tjandra, 2019, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan tertentu*, Sumur, Bandung.

Zainudin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

C. Website

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri> diakses pada tanggal 2 September 2022, Pukul 23.40 WIB

www.aplikasi.bkkbn.go.id, diakses pada tanggal 6 September 2022, Pukul 22.32 WIB.

www. BPS.go.id, diakses pada tanggal 1 Februari 2023, Pukul 17.51 WIB.

D. Jurnal

Annisa Nurmahdalena, "Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir", *eJurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol.4 No. 4 (2016).

Naony Fenti Istiqlallia, Raisa Ardelia, Pramudya Ramadhanti, "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 25 No. 2 (2020).

E. Sumber Lain

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka.

